

TESIS

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
(JPN) DALAM MENANGANI PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI
TERPIDANA PERKARA KORUPSI YANG
MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS TIDAK
DITEMUKAN**



Diajukan oleh:

**GRHADY DWI HARTANTI
NIM. 2320215320073**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA
NEGARA (JPN) DALAM MENANGANI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DARI TERPIDANA PERKARA
KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA DAN
AHLI WARIS TIDAK DITEMUKAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

oleh:

**GRHADY DWI HARTANTI
NIM. 2320215320073**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

JUDUL : KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM
MENANGANI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DARI TERPIDANA PERKARA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA
DAN AHLI WARIS TIDAK DITEMUKAN
NAMA : GRHADY DWI HARTANTI
NIM : 2320215320073

Disetujui
Komisi Pembimbing,

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui,

Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing

**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal Juni 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. (Pembimbing)

HALAMAN PERSEMBAHAN

**DENGAN MENGUCAP SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT
ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA**

YANG TELAH MEMBERIKAN KEKUATAN, KESEHATAN, DAN
KETABAHAN HATI, HINGGA AKHIRNYA KARYA ILMIAH (TESIS) INI
DAPAT KUSELESAIKAN DENGAN SEGALA KETERBATASAN DAN
PERJUANGAN.

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK ORANG-ORANG YANG PALING
BERARTI DALAM HIDUPKU.

UNTUK SUAMI TERCINTA,
YANG SELALU MENJADI PELIPUR LARA, PENYEJUK HATI, PENENANG
DALAM GELISAH, PENYEMANGAT DALAM LELAH, SERTA TEMAN
SEJATI DALAM SUKA DAN DUKA. TERIMA KASIH ATAS CINTA, DOA,
KESABARAN, DAN PENGORBANANMU SELAMA INI.

UNTUK MAMA TERSAYANG,
SUMBER KEKUATANKU, PELITA HIDUPKU, DAN ALASAN TERBESAR
DALAM SETIAP LANGKAH PERJUANGANKU. TERIMA KASIH ATAS DOA-
DOA YANG TAK PERNAH PUTUS, NASIHAT YANG TAK PERNAH HABIS,
SERTA CINTA YANG TAK PERNAH BERKURANG.

UNTUK PARA DOSEN, SAHABAT, DAN TEMAN-TEMANKU,
YANG TELAH MENJADI BAGIAN PENTING DALAM PERJALANAN
AKADEMIK INI, DENGAN BANTUAN, KERJASAMA, DUKUNGAN, DAN
CANDA TAWA YANG TAK TERNILAI.

DENGAN RASA HORMAT DAN CINTA YANG MENDALAM,
KUSAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA ATAS SEMUA
DOA, CINTA, DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN HINGGA AKU
DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI

Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. "Karena sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Grhady Dwi Hartanti
N I M : 2320215320073
Program Studi : Magister Hukum
Konstentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sbeenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiarisme.

Apabila dimkemudain hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



GRHADY DWI HARTANTI
NIM. 2320215320073

DWI HARTANTI, GRHADY. 2025. KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM MENANGANI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI TERPIDANA PERKARA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS TIDAK DITEMUKAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H. 106 Halaman.

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak merusak pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tidak hanya diarahkan pada pemidanaan semata, melainkan juga menitikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan yang strategis sebagai kuasa hukum negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana tindak pidana korupsi maupun pihak lain yang menerima atau menguasai harta hasil tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan JPN dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata dan untuk mengkaji implikasi hukum apabila terpidana korupsi meninggal dunia dan ahli warisnya tidak dapat ditemukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan JPN diatur secara jelas dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan gugatan perdata oleh JPN kerap menghadapi kendala serius ketika terpidana korupsi meninggal dunia sebelum membayar uang pengganti dan tidak terdapat ahli waris yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketiadaan ahli waris menyebabkan terjadinya kekosongan subjek hukum sebagai pihak tergugat, sehingga

gugatan perdata tidak dapat dieksekusi meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan hambatan serius dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang bersifat permanen. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan dan sinkronisasi regulasi antara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum waris, termasuk penguatan mekanisme pengambilalihan warisan tak bertuan oleh negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan peran Jaksa Pengacara Negara dalam menegakkan hukum, melindungi keuangan negara, serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.

DWI HARTANTI, GRHADY. 2025. KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM MENANGANI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI TERPIDANA PERKARA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS TIDAK DITEMUKAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H. 106 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara; Penggantian Kerugian Keuangan Negara; Korupsi; Ahli Waris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam memulihkan kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata terhadap terpidana korupsi serta implikasi hukumnya apabila ahli waris terpidana tidak ditemukan setelah gugatan diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa: pertama, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan strategis dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme gugatan perdata, berdasarkan kedudukannya sebagai wakil negara di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dasar hukum kewenangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, implikasi hukum apabila ahli waris terpidana korupsi tidak ditemukan setelah gugatan perdata diajukan adalah terhambatnya proses eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata, sehingga putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan, masih terjadi kekosongan hukum dalam pemulihan aset, dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara secara permanen.

DWI HARTANTI, GRHADY. 2025. THE AUTHORITY OF THE STATE ATTORNEY IN HANDLING THE RETURN OF STATE FINANCIAL LOSSES FROM CONVICTED CORRUPTION CASES WHO DIED AND THEIR HEIRS WAS NOT FOUND. Master of Law Programs, Postgraduate Programs, University of Lambung Mangkurat. Supervisor: Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H. 106 Pages.

ABSTRACT

Keywords: State Attorney; Reimbursement of State Financial Losses; Corruption; Heirs.

The purpose of this study is to find out the authority of the state prosecutor in recovering state financial losses through civil lawsuits against corruption convicts and the legal implications if the heirs of the convict are not found after the lawsuit is filed. This study uses normative legal research methods. From the results of the analysis, it was found that first, the state attorney has strategic authority in efforts to recover state financial losses due to corruption through the civil lawsuit mechanism, on the basis of legal standing as a state representative in the field of civil law and state administration. The legal basis is in Law 16/2004 jo. Law 11/2021 of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, Article 32 paragraph (1) of Law 31/1999 jo. Law 20/2001 on the Eradication of Corruption. Second, the legal implication if the heirs of the convicted corruption are not found after the civil lawsuit is filed is the inhibition of the execution process of returning state financial losses through civil channels, so that the verdict becomes unenforceable, there is still a legal vacuum in asset recovery and has the potential to permanently lose state finances.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **"KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SETELAH GUGATAN PERDATA NAMUN AHLI WARIS DARI TERPIDANA TIDAK DITEMUKAN"** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Sendra Fernando Saputra, S.H. Suami yang tersayang, Siti Nurlaila, SKM Ibu yang tersayang, Dr. Prihartono, S.H.,M.H. Papah yang tersayang, yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin serta selaku Dosen Pembimbing Saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
6. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
7. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis dalam hal Kepustakaan dalam penulisan Tesis ini.
8. Kepada para atasan sekaligus Senior penulis dalam bertugas Ibu Dr. INDAH LAILA, S.H. M.H., Mbak Galuh Larasati, Ibu Indah Lestari, Pak Daryoko, Ayung, Betty, Suci, Welly, Nurul. Penulis sangat menghargai segala bentuk bimbingan, teladan, serta kehangatan persaudaraan yang telah diberikan selama ini. Meski tiada manusia yang sempurna, namun dedikasi, integritas, dan ketulusan yang senantiasa Bapak-Bapak tunjukkan telah memberikan makna yang luar biasa dalam perjalanan pribadi penulis.
9. Teman-teman penulis angkatan 2023 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas A dan Kelas Hukum Acara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.

10. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

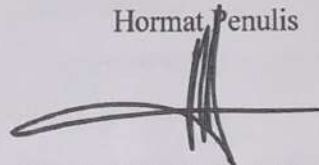
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan limpahan Rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan yang akan datang terutama dalam kajian ilmu hukum.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juni 2025

Hormat Penulis



GRHADY DWI HARTANTI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Tinjauan Teoritis	9
1.1 Teori Kewenangan.....	9
1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum.....	15
2. Tinjauan Konseptual	21
2.1 Jaksa Pengacara Negara (JPN)	21
2.2 Kerugian Keuangan Negara.....	23
2.3 Waris dalam Hukum Perdata	26
2.4 Gugatan Perdata dalam Konteks Korupsi	29
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	33
3. Tipe penelitian.....	34
4. Sumber Bahan Hukum	34
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
H. Sistematika Penulisan	37
BAB II KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA TERHADAP TERPIDANA KORUPSI.....	39
A. Legal Standing Jaksa Pengacara Negara dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Melalui Gugatan Perdata.....	39

B. Kerangka Hukum Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Melakukan Gugatan Perdata Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi	55
BAB III IMPLIKASI HUKUM APABILA AHLI WARIS TERPIDANA KORUPSI TIDAK DITEMUKAN PASCA GUGATAN PERDATA DIAJUKAN	73
A. Kontruksi Hukum Dalam Mewarisi Tanggung Jawab Gugatan Perdata Akibat Tindak Pidana Korupsi	73
B. Akibat Hukum Gugatan Non-Executable Apabila Ahli Waris Terpidana Korupsi Tidak Ditemukan	89
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105